

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2015). Menurut Prasetyanto dalam Prambudi (2014), pengawasan dana desa dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintahan di atasnya, yaitu pemerintahan kabupaten/kota. BPD mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawalan pengelolaan dana desa agar tidak disalahgunakan atau diselewengkan sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Maksud pemberian Dana Desa tersebut adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, demi meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Namun demikian, ternyata dalam implementasinya masih terdapat banyak masalah.

Dana desa dalam pengelolaannya dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa. Pengelolaan dana desa dalam APBD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan daerah. Pengelolaan dana desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan ADD di DESA Rejo Basuki ini pengalokasian dana desa hanya berfokus pada pembangunan balai desa jalan desa dan gorong-gorong dan tunjangan untuk aparat desa, sedangkan prasarana yang lain belum tersentuh seperti pembangunan *sanitasi* (prilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih), yang lebih dibutuhkan masyarakat belum ditangani dengan baik dan masih sangat jauh dari kata mencukupi untuk kebutuhan masyarakat karena terkendala dengan dana ADD yang minim. Berikut Tabel Bidang Pelaksanaan Pembangunan desa Rejo Basuki.

Tabel 1.
Data ADD Tahun 2018

| No | Uraian | Satuan |
|----|---------------------------------|-------------------|
| 1. | Penyelenggaraan pemerintah desa | Rp. 445.242.400 |
| 2. | Bidang pembangunan | Rp. 591.795.800 |
| 3. | Bidang pembinaan kemasyarakatan | Rp. 54.167.500 |
| 4. | Bidang pemberdayaan masyarakat | Rp. 83.973.500 |
| 5. | Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 48.150.000 |
| | Jumlah | Rp. 1.223.329.200 |

Tabel 2.
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

| No | Uraian | Satuan |
|----|--|--------------------|
| 1 | Pembangunan Jalan Lapen | Rp. 330.250.000,00 |
| 2 | Pembangunan Jalan Telford | Rp. 94.868.000,00 |
| 3 | Pemnamngunan Pembentukan Badan Jalan | Rp. 48.449.000,00 |
| 4 | Pembangunan Gorong – Gorong | Rp. 33.934.000,00 |
| 5 | Pembangunan Tembok penahan Tanah (TPT) Uk Tinggi 80cm | Rp. 19.903.000,00 |
| 6 | Pembangunan Tembok penahan Tanah (TPT) Uk Tinggi 240cm | Rp. 40.944.000,00 |
| 7 | Pembangunan Drainase Vol. 0,5 x 0,3 x 0,5 M | Rp.35.095.000,00 |
| 8 | Pembangunan Drainase Vol. 0,7 x 0,5 x 0,9 M | Rp.28.175.000,00 |
| 9 | Pembuatan Paving sarana olahraga (SORGA) | Rp.106.439.000,00 |
| 10 | Pembuatan Baliho | Rp .7.969.000,00 |
| 11 | Pembuatan Kios Milik Kampung | Rp.65.000.000,00 |
| 12 | Penyertaan Modal Bumk | Rp.50.400.000,00 |
| | Jumlah | Rp.891.427.296,00 |

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa selain terkendala dengan dana ADD yang kurang, dana yang diperoleh hanya di fokuskan untuk operasional desa, belanja aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ini untuk belanja aparat desa sebesar 60% dan untuk kegiatan ekonomi hanya terlihat dari persentasi penggunaan alokasi dana desa antara 35%-45%

Dari penelitian oleh Tampubolon (2014) dengan judul Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa dalam alokasi Dana Desa di Desa Teluk Bakau sudah menjalankan prinsip *good governance*. Dalam mendukung terwujudnya *good governance* masyarakat sebagai salah satu alat untuk mendorong berjalannya ketiga prinsip-prinsip *good governance*.

Dimensi *akuntabilitas* Alokasi Dana Desa terhadap masyarakat belum dapat terlaksana dengan baik, dalam proses pembuatan sebuah keputusan dalam alokasi dana yang dibuat secara tertulis tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar, hanya saja hal ini tidak dipublikasikan dengan baik kepada seluruh masyarakat. Dimensi *transparansi* ditemukan bahwa secara keseluruhan pada dimensi ini sudah berjalan dengan baik seperti kerjasama yang terjalin sudah dan semua masyarakat serta aparatur pemerintah sudah bekerja saling mendukung, hanya saja terkadang permasalahan terjadi karena biasanya tidak semua kegiatan dapat diinformasikan kepada masyarakat sehingga terjadi pemberitaan yang membuat masyarakat berpandangan negatif. Dimensi *partisipasi* masyarakat dapat diketahui bahwa masyarakat yang diikutsertakan adalah perwakilan dari masyarakat desa saja. Seperti tokoh masyarakat, tidak semua masyarakat dapat ikut serta dalam perumusan alokasi Dana Desa. Partisipasi masyarakat masih di mobilisasi mereka tidak datang dengan kesadaran sendiri. Dalam penyusunan alokasi Dana Desa 16 masyarakat desa Teluk Bakau hanya datang untuk melihat perumusan berlangsung namun tidak diberi kesempatan untuk memberikan ide serta masukan terhadap pengalokasian dana tersebut.

Permasalahan yang lain sering terjadi diberbagai daerah di desa adalah kontribusi alokasi dana desa dalam membiayai belanja desa lebih besar dari pada kontribusi pendapatan asli desa terhadap belanja desa. Hal ini dikarenakan pendapatan asli desa yang masih sedikit dibandingkan dengan alokasi dana desa. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Oktora, Fahri dan Winston (2013), yang menyatakan bahwa PAD memiliki hubungan yang kurang erat dengan belanja modal dikarenakan proporsi PAD dalam komposisi Pendapatan Daerah

rendah. Jumlah dana yang dikeluarkan tidak sesuai dengan apa yang telah teralisasi, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi di desa tersebut masih belum terlaksana dengan baik sehingga belum terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Aparatur desa tersebut dalam mengambil keputusan masih belum tepat karena masih mengutamakan kepentingan pribadinya. Dan kurangnya SDM pengelolaan keuangan desa di Bidang IT menurut kaur desa rejo basuki (Choirul anam) pada tanggal 14 november 2019.

Kemudian dari kajian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Januari 2015 terhadap pengelolaan keuangan desa, baik Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa, KPK menemukan 14 temuan pada empat aspek, yakni aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan, dan aspek sumber daya manusia. Pada aspek tata laksana, terdapat lima persoalan, antara lain kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa; satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa belum tersedia; transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa masih rendah, laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi, serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa. Dari beberapa penelitian terdahulu dan dari hasil kajian KPK di atas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat banyak masalah dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa. Pemerintah setiap desa mau tidak mau harus siap untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa tersebut kepada pemerintah maupun masyarakat. Setiap desa yang saat ini jumlahnya mencapai 72 ribu di seluruh Indonesia, memperoleh anggaran berkisar Rp 800 juta hingga Rp 1,4 miliar per desa, dengan dana sebesar itu, tata kelola yang baik (*good governance*) haruslah ditetapkan dalam pengelolaannya.

Penelitian pengelolaan Dana Desa ini difokuskan pada penerapan akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa. Penerapan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan paska kegiatan sehingga pengelolaan Dana Desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan. Penelitian yang dilakukan puteri (2015) yang berjudul Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa Sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan alokasi dana desa telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan Pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

Atas dasar uraian di atas, maka penelitian ini tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Desa, Alokasi Desa, Kebijakan Desa Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Rejo Basuki.**

B. Identifikasi Masalah

Terdapat banyak masalah dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa, baik Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa. Kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa; satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa belum tersedia; transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa masih rendah, laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi, serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah pendapatan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat pada desa Rejo Basuki?
2. Apakah alokasi desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat pada desa Rejo Basuki?
3. Apakah kebijakan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat pada desa Rejo Basuki?
4. Apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat pada desa Rejo Basuki?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris pendapatan desa terhadap kesejahteraan masyarakat pada desa Rejo Basuki

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh alokasi desa terhadap kesejahteraan masyarakat pada desa Rejo Basuki
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat pada desa Rejo Basuki
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat pada desa Rejo Basuki?

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi peneliti

Semoga penelitian ini dapat menjadi salah satu titik rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan cahaya ilmunya kepada peneliti, sehingga pengetahuan dan pengalaman terkait hal yang diteliti semakin bertambah.

b. Bagi akademisi.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi akademisi. Penelitian ini juga dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya, khususnya bagi peneliti yang memiliki fokus penelitian yang sama.

c. Bagi pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat demi peningkatan kualitas kinerja pemerintah khususnya dalam hal pengelolaan Dana Desa.

F. Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan Skripsi penulis membagi 5 bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini Penulis akan menguraikan Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITI

Dalam Bab II berisi kajian teoritik yang diperlukan dalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang

telah dirumuskan dalam penelitian ini, tinjauan atas penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab III ini, membahas mengenai metode atau langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu meliputi rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, variabel penelitian, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi perusahaan, analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab tiga, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian kebenaran serta jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam perumusan masalah.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, refleksi untuk memberikan saran berdasarkan kesimpulan penelitian yang kemudian perlu disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk kebijaksanaan perusahaan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA